

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Pitlo, 1986, "*Pembuktian dan Daluwarsa*", alih bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1999, "*Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP.24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP.37 Tahun 1998)*", Mandar Maju, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, "*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, "*Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*", Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1993, "*Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*", Alumni, Bandung.
- Bachtiar Effendi, 1993, "*Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*", Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 1978, "*Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria*", Penerbit Esa Studi Klub, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta.
- CST. Kansil, 1986, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.
- Dendy Sugono dkk, 2008, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1998, "*Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudahnya Berlakunya UUPA*", Armico, Bandung.
- Irawan Soerodjo, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Arloka, Surabaya.
- Irene Eka Sihombing, 2005, "*Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*", Cet I, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*", Gramedia, Jakarta.

- Madjloes, 1977, *“Beberapa Petunjuk Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah”*, Departemen Hukum Institut Ilmu Pengetahuan, Jakarta.
- Mukti Arto, 2008, *“Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama”*, Cetakan ke VIII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ratu Ester Damaris Makarunggala, *“Fungsi Pengecekan Sertifikat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur”*, Resume Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, 2016.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo. Soemitro, 1994, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *“Hukum Adat Indonesia”*, Rajawali, Jakarta.
- Suprayitno, *“Pemeriksaan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT Pada Kantor Pertanahan Kota Medan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta (Studi di Kota Medan)”*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.
- Supriadi, 2007, *“Hukum Agraria”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1975, *“Metodologi Research”*, Jilid II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UUPA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat akta Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- PKBPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

SUMBER INTERNET:

<http://dppkad.patikab.go.id/category/download/> , Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pati, Daftar Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB dari PPAT / Kantor Lelang Negara, diakses Desember 2015.

<http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kab-pati/> , UP3AD Kab. Pati, Senin , 4 - November - 2013 | Pati, diakses Juni 016.

<http://www.google.co.id/search?q=2015+bps+jawa+tengah+kepadatan+penduduk+per+km+persegi&btnG=Telusuri&hl=id&gbv=1>, Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013, diakses Juni 2016.

<https://glosarid.com/index.php/term/pengetahuan,sawah-adalah.xhtml>, Glosarium Kamus Online, diakses Juni 2016.

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=Ip81Vr-6HKHbmgWitligCQ#q=arti+cadaster+land+meter+kennis , Soeradji “*Prinsip-Prinsip Pendaftaran Tanah Sebagai Pengantar*”, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2007, diakses tanggal 1 Nopember 2015.